

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2015). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka TA 2011 s.d. 2014.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2015). Siaran Pers BPK RI 2015 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Sikka.
- Gibson, James L, John M. Ivanchevich, dan James H. Donnelly Jr. (1996). *Organisasi Struktur, Proses*. Terjemahan Nunuk Adiarni. Edisi Delapan. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Handyaningrat, Soewarno. (1986). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Handoko, T. Hani. (2000). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. BPFE. Yogyakarta.
- Harmawan, Wandu. (2014). *Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Makmur, H. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marhayati. (2015). Penilaian Kendaraan Dinas untuk Tujuan Pelaporan Keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Murhaini, H. Suriansyah. (2014). *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rahayu, Cici. (2011). Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik. UNIKOM. Bandung.
- Sembiring, Tenun. (2009). Fungsi dan Tugas Inspektorat Dalam Pengendalian Intern Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Karo Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Sills, David Lawrence. (1968). *International Encyclopedia of the Social Science*. New York: Mcmillan and Free Press.
- Situmorang, Viktor. M, dan Jusuf Juhir. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Steers, Richard M. (1985). *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga.
- Triatmodjo, Sudiby. (2000). *Sistem Pengawasan*. Jakarta: LAN.
- Tuasikal, Askam. (2008). *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Maluku*. Universitas Pattimura Ambon Vol.10 No.1.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Uswanas, Taufiq Heru. (2004). Efektivitas Organisasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Zamzami, Faiz, Ihda Arifin Faiz, dan Mukhlis. (2015). *Audit Internal Konsep dan Praktik (sesuai International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing 2013)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.